**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam keseharian hidup manusia di dunia. Tak ada satuhal pun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu mengalami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara informal maupun formal. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam pembangunan human capital yang merupakan pendorong utama sumber daya manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, sehingga pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Gagasan investasi memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang bagi individu, masyarakat luas maupun bagi negara. Hal ini senada dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa . fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian halnya bagi masyarakat Indnesia yang memiliki wilayah yang sangat luas.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No.22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengarahkan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi khususnya kemandirian di bidang keuangan termasuk mengenai masalah keterbatasan dana pembangunan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan akan dapat menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi pendidikan yang sentralistik. Sekolah akan mampu secara mandiri meningkatkan kinerjanya untuk memajukan sistem pendidikannya dengan menggali, memanfaatkan dan mengalokasikan berbagai potensi sumber daya yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kerangka inilah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan sangat dominan dalam sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuanganpun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaanya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Masalah keuangan sekolah juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan politik yang sedang berkembang di masyarakat, demikian halnya masalah evaluasi keuangan sekolah tidak terlepas dari masalah politik. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi Kepala Sekolah yang profesional dituntut kemampuan menggelola keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan (pengelolaan keuangan), evaluasi dan pertanggungjawabanya. Disamping itu kepala sekolah juga harus memahami konteks politik dan ekonomi serta implikasinya terhadap keuangan sekolah.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan dibidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, dimasa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan (benefit) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (financial atau non financial).

Perencanaan keuangan sekolah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Oleh karena itu manajemen keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah diamanatkan negara yaitu sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang terdapat pada BAB II Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan, Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2 :

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Melihat kondisi kota Makassar yang terkenal sebagai kota Metropolitan di mana telah berdiri 2 Madrasah negeri yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Penulis melihat ada hal yang mencolok antara kedua Madrasah ini. Madrasah Aliyah Negeri 1 yang notabenenya adalah yang pertama, sekarang telah jauh tertinggal dibanding Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN Model), perbedaan yang mencolok bisa dilihat dari segi sarana dan prasarananya. Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN Model) telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai ditunjang dengan letaknya yang strategis di pertigaan jalan AP. Pettarani dan jalan Sultan Alauddin serta ketenarannya telah diketahui hampir segenap lapisan masyarakat di kota Makassar. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi Madrasah Aliyah Negeri 1 yang keberadaannya belum banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat di kota Makassar, sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar juga belum memadai, bahkan menurut pernyataan salah seorang pengajar di sekolah itu, apabila diguyur hujan yang lebat sekolah ini bisa kebanjiran dan akibatnya murid-murid pun terpaksa diliburkan. Namun sekarang sekolah ini sudah mulai membenahi diri dengan melakukan penimbunan agar tidak terjadi lagi banjir yang merendam sekolah tersebut, serta telah dibangun ruang kelas baru untuk menambah kuota siswa di sekolah itu karna adanya peningkatan jumlah pendaftar pada saat penerimaan murid baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah ini menarik untuk diteliti dengan harapan dapat mengungkap atau memberikan gambaran mengenai proses Perencanaan Keuangan Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar yang keberadaannya dibawah naungan Kementrian Agama dan tentunya ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan sekolah lain yang berada dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut pengamatan awal pada saat melakukan observasi langsung ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar, dalam merumuskan rencana keuangan sekolah, pihak kepala sekolah, komite sekolah, dan guru senantiasa mendiskusikan program-program yang akan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa pola pendekatan yang dijadikan landasan dalam keputusan sangat bervariasi, bergantung pada program-program yang akan dijalankan dan konsep baru yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Keputusan ada yang diambil berdasarkan rasio yang matang dengan analisis yang cermat. Hal ini menunjukkan tahapan dalam hal proses pengambilan keputusan yang rasional.

Selain itu dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat menghasilkan program-program yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi sekolah. Jadi, dalam hal pelaksanaan keuangan sekolah hingga pada evaluasinya nanti diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah disusun dalam perencanaan dapat tercapai. Namun kenyataan di lapangan tidak demikian, karena masih banyak program-program dijumpai tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga proses pelaksanaannya dijalankan sesuai kondisi atau tiba masa tiba akal.

1. **Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan keuangan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar dalam menyusun perencanaan keuangan sekolah ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perencanaan keuangan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar dalam menyusun perencanaan keuangan sekolah ?
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoretis,
2. Bagi akademis/lembaga pendidikan, menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Administrasi pendidikan.
3. Menjadi bahan skripsi bagi penulis dan menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang lain .
4. Bagi peneliti , menjadi masukan dalam meneliti dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan sekolah.
5. Manfaat praktis,
   1. Bahan masukan bagi para pengelola pendidikan, baik para tata usaha, kepala sekolah dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan melalui peranan perencanaan keuangan sekolah di era desentralisasi.
   2. Secara real penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan akhir dalam rangka mendapatkan gelar S1 pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM.